

DAMPAK PROGRAM KEWIRAUSAHAAN SOSIAL (PROKUS) TERHADAP PENDAPATAN DAN KOHESI SOSIAL PENERIMA MANFAAT PKH DI KABUPATEN MOJOKERTO

Muslim Sabarisman

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

**email Koresponden Penulis: muslim008@brin.go.id*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan jaringan sosial bagi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi lapangan, studi ini menemukan bahwa intervensi ProKUS melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan berhasil mendorong kemandirian ekonomi. Penerima manfaat, seperti pengrajin sepatu di Sooko dan pedagang pentol di Mojoanyar, mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di sisi sosial, program ini memfasilitasi terciptanya jaringan sosial yang lebih kuat melalui interaksi dalam kelompok usaha dan koperasi, yang memperkuat kohesi komunitas dan pertukaran pengetahuan. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan modal dan kesenjangan kemampuan teknis masih menjadi hambatan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) efektif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi pasca-PKH, tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan tetapi juga dalam membangun modal sosial yang berkelanjutan di kalangan Penerima Manfaat PKH.

Kata Kunci:

program kewirausahaan sosial; penerima manfaat PKH

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan sekadar tentang rendahnya angka di rekening bank, melainkan sebuah kondisi kompleks yang mencabut hak individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari sandang-pangan yang layak, akses terhadap keadilan hukum, kesetaraan gender, hingga kehidupan yang bermartabat. Isu kesenjangan ekonomi ini merupakan tantangan global yang terus berlanjut, menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar bantuan sesaat. Dalam merespons hal ini, konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan hadir dengan menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi warganya (Svallfors, 2007). Pemerintah tidak hanya menjadi penjaga ketertiban, tetapi juga fasilitator yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, di mana keberhasilan program kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh dinamika institusi, keterbelahan sosial, dan nilai-nilai budaya setempat.

Lebih mendalam, (Alkire & Santos, 2014) membedakan kemiskinan menjadi dua bentuk: *primary poverty*, di mana pendapatan memang tidak mencukupi untuk kebutuhan minimum, dan *secondary poverty*, di mana pendapatan sebenarnya cukup namun tidak dialokasikan secara tepat. Kedua bentuk ini seringkali hadir bersamaan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Program bantuan sosial konvensional, meski vital, seringkali hanya menyentuh permukaan tanpa membangun fondasi kemandirian yang berkelanjutan. Keluarga penerima bantuan, seperti those dalam Program Keluarga Harapan (PKH), kerap terjebak dalam ketergantungan dan rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh (Hutahaean & Sitorus, 2022) bahwa ketidakpastian pendapatan adalah pintu gerbang menuju kemiskinan yang berulang.

Berdasarkan realita inilah, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI pada tahun 2020. Program ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan transformatif yang tidak hanya memberi "ikan", tetapi juga "kail" dan keterampilan untuk memaknainya. Sejalan dengan definisi kewirausahaan sosial dari (Yunus, 2009) sebagai usaha yang menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi dan keberlanjutan finansial, ProKUS dirancang untuk memberdayakan keluarga miskin dan rentan, khususnya lulusan PKH, dengan menggabungkan semangat bisnis dan misi sosial.

Efektivitas program kewirausahaan sosial sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif. Seperti diungkapkan oleh (Austin et al., 2012) dalam "*Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?*", kewirausahaan sosial membutuhkan integrasi antara nilai sosial dan prinsip bisnis yang tepat. Sementara itu, penelitian (Desa & Basu, 2013) menekankan pentingnya faktor lingkungan dan dukungan institusi dalam kesuksesan usaha sosial. Temuan mereka menunjukkan bahwa program yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara simultan cenderung lebih berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadi fokus artikel ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menguji efektivitas pendekatan kewirausahaan sosial ini di lapangan, khususnya dalam konteks pemberdayaan pasca-PKH. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana ProKUS tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi juga seperti dikemukakan (Mair & Marti, 2006), bahwa memperkuat modal sosial dan jaringan antarwarga, yang merupakan tulang punggung komunitas yang tangguh. Kajian pustaka menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial, jika didukung dengan pendampingan dan inkubasi yang tepat seperti yang diuraikan (Al-Mubarak & Busler, 2013), dapat menjadi katalis untuk pembangunan ekonomi lokal yang inklusif.

Studi lebih lanjut oleh (Peredo & McLean, 2006) dalam "*Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept*" mengkonfirmasi bahwa pendekatan kewirausahaan sosial mampu menciptakan dampak ganda ekonomi dan sosial secara simultan. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti desain program yang sesuai konteks lokal, kapasitas penerima manfaat, dan keberlanjutan pendampingan. Penelitian (Zahra et al.,

2009) juga menambahkan bahwa aspek kepemimpinan lokal dan dukungan komunitas menjadi kunci dalam transformasi sosial melalui kewirausahaan.

Akan tetapi, jalan menuju pemberdayaan yang berkelanjutan tidaklah mulus. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di mana program ini diimplementasikan, tantangan nyata menghadang. Penerima manfaat, yang umumnya adalah pengrajin sepatu di Kecamatan Sooko atau pedagang kecil di Mojoanyar, menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan modal usaha yang seringkali tidak mencukupi untuk skala produksi yang lebih besar. Selain itu, kesenjangan keterampilan kewirausahaan, mulai dari manajemen keuangan hingga strategi pemasaran digital menjadi penghambat signifikan. Pendampingan teknis yang diberikan kadang dirasakan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil dan tingkat kapasitas mereka. Masalah regulasi dan administrasi yang rumit juga seringkali membebani usaha mikro yang baru merintis.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, kami hendak membuka diskusi untuk mencari solusi kongkrit. Bagaimana ProKUS dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai program bantuan, melainkan sebagai sebuah peluang usaha yang mandiri dan berjejaring? Bagaimana memastikan bahwa inisiatif ini mampu menciptakan hubungan sosial yang positif dan saling mendukung, sekaligus menjadi mesin penggerak ekonomi keluarga? Diharapkan, refleksi dan analisis yang disajikan dapat memberikan kontribusi berarti bagi para pemangku kebijakan, pendamping program, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan yang diraih bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan fondasi kokoh untuk masa depan yang lebih mandiri dan bermartabat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang melalui pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dampak Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) terhadap peningkatan pendapatan dan jaringan sosial penerima manfaat PKH di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan paradigma penelitian kualitatif (Denzin & Lincoln, 2011), tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi masalah melalui studi literatur yang mengkaji teori kemiskinan (Alkire & Santos, 2014) dan kewirausahaan sosial (Yunus, 2009), serta diskusi dengan Dinas Sosial setempat untuk memahami kebutuhan riil masyarakat. Kerangka pemikiran kegiatan mengintegrasikan teori kewirausahaan (Asnawati, 2021) dan teori kebutuhan psikologis dasar (Deci & Ryan, 2012) dalam merancang solusi pemberdayaan.

Tahap pengumpulan data dilaksanakan secara partisipatif di Kecamatan Sooko dan Mojoanyar selama satu minggu pada 2023, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan terhadap usaha produktif, dan studi dokumentasi. Seluruh proses pengumpulan data mengedepankan partisipasi aktif responden sesuai prinsip penelitian kualitatif (Denzin & Lincoln, 2011). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik melalui proses transkripsi, organisasi data,

dan identifikasi pola, dengan menerapkan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan temuan. Analisis juga mempertimbangkan konsep inkubasi bisnis (Al-Mubarak & Busler, 2013) dan modal sosial (Mair & Marti, 2006) dalam mengevaluasi efektivitas program.

Tahap akhir berupa evaluasi dan formulasi rekomendasi berbasis temuan, yang difokuskan pada penyempurnaan sistem pendampingan, akses permodalan, dan jaringan pemasaran dengan memperhatikan aspek legitimasi kewirausahaan sosial (Nicholls, 2010). Melalui rangkaian metodologis yang sistematis ini, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berhasil memetakan dampak program, tetapi juga menyusun rekomendasi solutif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan lapangan, guncangan pendapatan terbukti menjadi penyebab utama kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Mojokerto (Hutahaean & Sitorus, 2022). Ketidakpastian pendapatan yang dialami penerima manfaat PKH membuat mereka rentan terhadap kemiskinan jangka panjang, terutama ketika menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya memperburuk kemiskinan tetapi juga mempengaruhi perubahan status sosial ekonomi dalam jangka panjang (Obayelu & Edewor, 2022), yang terlihat dari dinamika kemiskinan yang dipengaruhi akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) hadir sebagai solusi inovatif dengan pendekatan kewirausahaan sosial yang didefinisikan sebagai usaha bisnis untuk menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi dan keberlanjutan finansial (Yunus, 2009). Konsep ini sejalan dengan definisi kewirausahaan sebagai proses menciptakan nilai dan inovasi (Stephen & Coulter, 2016) serta keberanian mengambil risiko (Kasmir, 2007). Implementasi ProKUS di Mojokerto menunjukkan perkembangan signifikan dimana pada tahun 2021 program ini telah menjangkau 8.000 KPM, dengan dukungan 27 inkubator bisnis di 11 provinsi (itsdrpm, 2021).

Di Kecamatan Sooko, fokus program pada pengrajin sepatu olahraga berhasil meningkatkan kapasitas produksi hingga 60 pasang per hari dengan harga jual Rp 60.000-180.000 per pasang. Namun, tantangan utama berupa keterbatasan modal masih menjadi kendala, dimana banyak pengrajin harus meminjam dari lembaga simpan pinjam lokal. Sementara di Kecamatan Mojoanyar, usaha pentol bakso dan sosis goreng yang dijalankan Mas "SG" berhasil menghasilkan keuntungan bersih Rp 500.000 per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran inkubator bisnis yang menurut (Al-Mubarak & Busler, 2013) merupakan alat penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Inkubator berperan sebagai mentor yang memberikan pendampingan teknis mengenai

perhitungan biaya, penentuan harga jual, dan strategi pemasaran. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan kadang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penerima manfaat.

Dari aspek pemberdayaan sosial, program ini berhasil menciptakan agen perubahan di masyarakat sebagaimana ditemukan dalam penelitian (Prayogo, 2017) tentang wirausaha sosial di Sidoarjo. Penerima manfaat seperti Ibu "S" dan Mas "SG" tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Mereka berkembang menjadi tokoh masyarakat yang menginspirasi melalui keteladanan dan inovasi usaha.

Pembahasan hasil ini mengungkap bahwa meskipun ProKUS berhasil menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, tantangan seperti keterbatasan modal, kesenjangan keterampilan, dan ketidaksesuaian pendampingan teknis masih perlu menjadi perhatian. Pemerintah perlu memperkuat dukungan melalui pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, termasuk penyediaan akses permodalan yang lebih mudah, pelatihan kewirausahaan yang relevan, serta pendampingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan riil penerima manfaat. Dengan demikian, kewirausahaan sosial dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan memperkuat jaringan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial konvensional.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, Program Kewirausahaan Sosial terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah yang dikembangkan melalui program ini berhasil meningkatkan pendapatan keluarga, sejalan dengan penelitian (Maseno & Wanyoike, 2022), tentang kewirausahaan sosial sebagai mekanisme transformasi sosial. Namun, implementasi program tidak terlepas dari kendala keterbatasan modal dan sumber daya yang juga diidentifikasi dalam studi (Nicholls, 2010) mengenai tantangan legitimasi kewirausahaan sosial.

Hasil observasi mengungkap bahwa ketidaksesuaian bimbingan teknis menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program. Banyak penerima manfaat merasa materi pelatihan kurang relevan dengan jenis usaha mereka, dan tingkat kesulitan yang diajarkan tidak sesuai dengan kapasitas. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses teknologi digital di kalangan penerima manfaat, dimana sebagian tidak memiliki perangkat pintar untuk mengembangkan usaha melalui platform digital.

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Zahra et al., 2009) yang menekankan pentingnya dukungan lingkungan dalam kesuksesan usaha sosial. Minimnya partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung usaha sosial menjadi faktor penghambat perkembangan program. Selain itu, kompleksitas regulasi dan administrasi juga menjadi tantangan, khususnya dalam proses perizinan dan perpajakan yang seringkali membebani usaha skala mikro.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program ini berhasil menciptakan dampak sosial yang positif. Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam kegiatan ekonomi terbukti memperkuat hubungan sosial antarindividu, mendukung temuan (Mair & Marti, 2006) tentang peran kewirausahaan sosial dalam membangun jaringan sosial yang solid. Program ini juga mendorong inovasi dan kreativitas, sebagaimana dikemukakan (Deci & Ryan, 2012) mengenai penciptaan nilai tambah melalui kewirausahaan sosial.

Dari aspek pemberdayaan, program berhasil menumbuhkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan pendekatan yang lebih holistik melalui penyediaan pelatihan yang relevan, pendampingan berkelanjutan, dan regulasi yang mendukung perkembangan usaha sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya dukungan komprehensif untuk kesuksesan kewirausahaan sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat melalui Program Kewirausahaan Sosial ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya berhasil menciptakan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga membangun modal sosial yang kuat melalui penguatan jaringan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kewirausahaan sosial dapat menjadi strategi efektif dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Kewirausahaan sosial telah menjadi salah satu pendekatan efektif dalam mengatasi kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Berdasarkan studi (Asnawati, 2021), kewirausahaan memiliki peran strategis dalam mengarahkan perekonomian negara menuju kondisi yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang tidak hanya mampu keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain di komunitasnya.

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial merupakan salah satu contoh konkret dari penerapan kewirausahaan sosial di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberdayakan keluarga miskin dan rentan melalui dukungan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, penerima manfaat (KPM) dilatih untuk mengembangkan usaha lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar di lingkungannya. Hasil implementasi menunjukkan bahwa banyak peserta ProKUS berhasil mengembangkan usaha di sektor jasa kebersihan, kerajinan tangan, hingga perdagangan kecil, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Salah satu kekuatan utama dari kewirausahaan sosial terletak pada kemampuannya memperkuat kohesi sosial. Melalui aktivitas usaha lokal, penerima manfaat berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, serta masyarakat sekitar, sehingga terbentuk jejaring sosial yang lebih luas dan produktif. Interaksi ini meningkatkan rasa saling percaya, solidaritas, dan gotong royong di antara anggota komunitas. Dalam beberapa kasus, para penerima manfaat juga

membentuk kelompok usaha bersama seperti koperasi dan komunitas kerajinan, yang menjadi wadah saling belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar.

Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan kewirausahaan sosial sangat vital. Pemerintah berperan menyediakan sumber daya finansial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha sosial. Dukungan ini mencakup penyediaan hibah, pinjaman lunak, maupun modal ventura, serta insentif pajak dan penyederhanaan prosedur perizinan. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan teknis untuk memastikan para pelaku usaha sosial memiliki kapasitas manajerial dan pemasaran yang memadai. Pendekatan multi-sektor ini memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi program kewirausahaan sosial. Keterbatasan modal dan sumber daya seringkali menjadi hambatan utama bagi individu atau kelompok untuk memulai serta mengembangkan usaha. Kurangnya keterampilan manajerial, pengetahuan tentang kewirausahaan, serta ketidaksesuaian antara materi pelatihan dengan kondisi lapangan juga turut memengaruhi efektivitas program. Selain itu, aspek regulasi dan administrasi, seperti prosedur perizinan dan akses pembiayaan, masih menjadi kendala yang menghambat perkembangan usaha sosial di tingkat akar rumput.

Untuk menjamin keberhasilan kewirausahaan sosial, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang mencakup koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, inkubator bisnis, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan dikelola secara transparan dan tepat sasaran, sementara lembaga pendamping harus menyesuaikan bimbingan teknis dengan karakteristik dan kemampuan penerima manfaat. Selain itu, pemantauan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan kewirausahaan sosial perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana tujuan pemberdayaan tercapai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat hubungan sosial, dan membangun kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, dukungan yang konsisten dari pemerintah dan lembaga terkait mutlak diperlukan agar program seperti ProKUS dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif, kewirausahaan sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sekaligus memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Kewirausahaan sosial terbukti menjadi strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui program

Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang digagas oleh Kementerian Sosial, keluarga miskin dan rentan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ProKUS berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta pembentukan jejaring sosial yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Kewirausahaan sosial tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, seperti meningkatnya rasa percaya diri, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, ketidaksesuaian pendampingan teknis, dan hambatan regulasi. Oleh karena itu, keberhasilan kewirausahaan sosial membutuhkan dukungan lintas sektor yang terintegrasi dan keberlanjutan pendampingan bagi penerima manfaat.

Dengan pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, kewirausahaan sosial dapat terus berperan sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Implikasi Kebijakan

1. Penguatan Dukungan Keuangan dan Akses Permodalan Pemerintah perlu memperluas skema pembiayaan inklusif melalui hibah, kredit mikro, dan dana bergulir bagi pelaku kewirausahaan sosial. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan sektor swasta dapat memperluas akses modal yang berkelanjutan bagi penerima manfaat ProKUS.
2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis Berkelanjutan Pelatihan kewirausahaan harus disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kemampuan peserta. Pendampingan tidak hanya berfokus pada keterampilan bisnis, tetapi juga pada manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk agar usaha lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
3. Penyederhanaan Regulasi dan Penguatan Ekosistem Usaha Sosial Pemerintah daerah dan pusat perlu menyusun kebijakan yang mempermudah proses perizinan, perpajakan, serta memberikan insentif bagi usaha sosial yang berorientasi pada dampak masyarakat. Pembentukan jejaring antar pelaku usaha sosial juga penting untuk memperkuat rantai nilai dan keberlanjutan bisnis.
4. Kolaborasi Multi-Pihak dan Pengawasan Dampak Sosial Keterlibatan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan efektivitas program. Evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi ProKUS harus menjadi bagian integral dari kebijakan agar perbaikan program dapat dilakukan secara adaptif dan berbasis bukti.
5. Pengembangan Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Lokal dan Inovatif Kebijakan ke depan perlu menekankan integrasi antara potensi lokal, inovasi

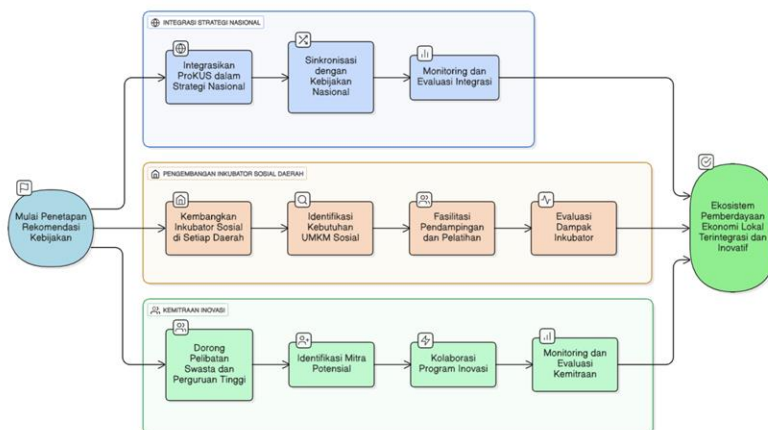
teknologi, dan kearifan sosial budaya setempat untuk menciptakan model usaha sosial yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Rekomendasi Arah Kebijakan

Dalam upaya memperkuat implementasi kewirausahaan sosial secara nasional, diperlukan integrasi menyeluruh Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) ke dalam strategi pembangunan nasional. Integrasi ini mencakup sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan konsistensi implementasi di seluruh lini pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kerangka kerja yang koheren antara program pemberdayaan masyarakat dengan agenda prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM.

Untuk mendukung implementasi di tingkat akar rumput, pengembangan inkubator sosial daerah menjadi strategi kunci dalam menyediakan infrastruktur pendukung yang tepat sasaran. Inkubator ini berfungsi sebagai pusat pendampingan terpadu yang menyediakan layanan menyeluruh mulai dari pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, hingga bimbingan teknis yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal. Keberadaan inkubator sosial di setiap daerah memastikan tersedianya ekosistem pendukung yang mampu merespons kebutuhan spesifik UMKM sosial dalam mengembangkan usaha berkelanjutan.

Strategi ketiga melengkapi pendekatan sebelumnya melalui pembangunan kemitraan inovatif yang melibatkan sektor swasta dan perguruan tinggi. Kemitraan ini menciptakan sinergi multipihak dimana swasta berkontribusi dalam skema pendampingan dan akses pasar, sementara perguruan tinggi berperan dalam pengembangan inovasi dan transfer teknologi. Kolaborasi strategis ini membentuk ekosistem pemberdayaan yang saling menguatkan, memastikan keberlanjutan program melalui sharing resources, knowledge, dan network yang memperkuat daya tahan usaha sosial dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan pembangunan.



Gambar 1. xxx

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mubarak, H. M., & Busler, M. (2013). The effect of business incubation in developing countries. *European Journal of Business and Innovation Research*, 1(1), 19–25.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring acute poverty in the developing world: Robustness and scope of the multidimensional poverty index. *World Development*, 59, 251–274.
- Asnawati, S. E. (2021). *KEWIRAUSAHAAN Teori dan Contoh Contoh Rencana Bisnis*. Asnawati.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2012). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? *RAUSP: Revista de Administração Da Universidade de São Paulo*, 47. <https://doi.org/10.1590/S0080-21072012000300003>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of Theories of Social Psychology*, 1(20), 416–436.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Desa, G., & Basu, S. (2013). Optimization or bricolage? Overcoming resource constraints in global social entrepreneurship. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 7(1), 26–49.
- Hutahaean, Y. M., & Sitorus, J. R. H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja di Pulau Jawa. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1165–1176.
- itsdrpm. (2021). *Standarisasi Pendampingan Inkubasi Bisnis ProKUS Kementerian Sosial*. Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://www.its.ac.id/drpm/id/2021/11/15/standarisasi-pendampingan-inkubasi-bisnis-prokus-kementerian-sosial/>
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. PT. RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/kewirausahaan/>

- Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business*, 41(1), 36–44.
- Maseno, M., & Wanyoike, C. (2022). Social entrepreneurship as mechanisms for social transformation and social impact in East Africa an exploratory case study perspective. *Journal of Social Entrepreneurship*, 13(1), 92–117.
- Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(4), 611–633.
- Peredo, A. M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. *Journal of World Business*, 41(1), 56–65.
- Prayogo, C. (2017). Studi deskriptif social entrepreneur (studi kasus pada pemilik Agfa di Sidoarjo). *Agora*, 5(1).
- Stephen, P., & Coulter, M. (2016). Manajemen, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P. Jakarta. Erlangga.
- Svallfors, S. (2007). *The political sociology of the welfare state: institutions, social cleavages, and orientations*. Stanford University Press.
- Yunus, M. (2009). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. Public affairs.
- Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. *Journal of Business Venturing*, 24(5), 519–532.